



## *Optimization Strategy for Sustainable Tourism Governance in Kampung Jenggalu Kito, Bengkulu City*

### **Strategi Optimalisasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Kampung Jenggalu Kito Kota Bengkulu**



Agustri Hestiana<sup>a</sup>  
Parwito<sup>b</sup>

#### **Article history:**

**Submitted:** 15 April 2026

**Revised:** 17 May 2026

**Accepted:** 16 June 2026

#### **Keywords:**

collaborative governance;  
educational tourism; local  
community participation;  
mangrove ecotourism;  
sustainable tourism

#### **Abstract**

*Sustainable tourism development requires a governance system capable of integrating environmental, economic, institutional, and community participation dimensions in a balanced manner. Kampung Jenggalu Kito, Bengkulu City, has considerable mangrove ecosystem potential that can be developed as a conservation- and education-based tourism destination. However, its management remains suboptimal due to inadequate supporting infrastructure, low tourist visitation, and weak coordination among stakeholders. This study aims to formulate strategies for optimizing sustainable tourism governance in Kampung Jenggalu Kito and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its management. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, documentation, and in-depth interviews with nine informants selected purposively based on their involvement in and knowledge of tourism management in the area. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that tourism governance optimization should prioritize greater policy transparency, stronger local community participation, improved institutional coordination, and the provision of infrastructure supporting mangrove-based educational tourism. The main supporting factors include the strategic location of the destination and its valuable mangrove resources, while the major constraints comprise limited community understanding of changes in the area's status, inadequate supporting facilities, and insufficient involvement of external stakeholders in supervision and assistance. These findings emphasize the need for a collaborative governance model that strengthens synergy among government institutions, tourism managers, local communities, and other relevant stakeholders. Such integration is expected to improve destination governance, strengthen mangrove conservation, enhance the competitiveness of educational ecotourism, and generate broader and more sustainable economic benefits for local communities.*

<sup>a</sup> Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Ratu Samban, Bengkulu, Indonesia

**Kata Kunci :**

*ekowisata mangrove;  
pariwisata berkelanjutan;  
partisipasi masyarakat; tata  
kelola kolaboratif; wisata  
edukasi*

**Abstrak**

Pengembangan pariwisata berkelanjutan membutuhkan tata kelola yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat secara seimbang. Kampung Jenggalu Kito, Kota Bengkulu, memiliki potensi ekosistem mangrove yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis edukasi dan konservasi, namun pengelolaannya belum optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, rendahnya kunjungan wisatawan, serta belum kuatnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi optimalisasi tata kelola pariwisata berkelanjutan di Kampung Jenggalu Kito serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap sembilan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan kawasan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi tata kelola perlu diarahkan pada penguatan transparansi kebijakan, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, penguatan koordinasi kelembagaan, serta penyediaan sarana prasarana yang mendukung pengembangan wisata edukasi mangrove. Faktor pendukung utama meliputi lokasi yang strategis dan potensi sumber daya alam mangrove, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap perubahan status kawasan, belum optimalnya fasilitas pendukung, serta minimnya keterlibatan pihak eksternal dalam fungsi pendampingan dan pengawasan. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan pengelolaan Kampung Jenggalu Kito membutuhkan model tata kelola kolaboratif yang memperkuat sinergi antara pemerintah, pengelola, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi sekaligus memperkuat konservasi mangrove dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal.

*Journal of Social Science and Humanities (JoSSH) ©2026.*

*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).*

**Corresponding author:**

Agustri Hestiana

Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, Indonesia

Email address: [agustrihestiana687@gmail.com](mailto:agustrihestiana687@gmail.com)

**1 Pendahuluan**

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan budaya suatu daerah. Namun, paradigma pembangunan pariwisata telah mengalami pergeseran dari orientasi yang semata-mata mengejar peningkatan kunjungan wisatawan menuju pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Pergeseran tersebut menempatkan konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) sebagai pendekatan penting dalam pengembangan destinasi. Keberlanjutan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan daya tarik wisata, tetapi juga oleh kemampuan tata kelola dalam mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan secara konsisten (Roxas et al., 2020; Sharpley, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi nasional maupun daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, melestarikan alam dan lingkungan, serta memperkuat kebudayaan. Konsekuensinya, keberhasilan pembangunan destinasi tidak cukup diukur melalui jumlah wisatawan atau pembangunan fasilitas, tetapi juga melalui kemampuan destinasi menghasilkan manfaat bagi masyarakat tanpa menurunkan kualitas sumber daya yang menjadi basis pariwisata. Pendekatan ini menjadi semakin penting pada destinasi berbasis sumber daya alam yang memiliki kerentanan ekologis.

Salah satu faktor penting dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan adalah tata kelola pariwisata (tourism governance). Tata kelola berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, pembagian peran, koordinasi, transparansi, partisipasi, dan hubungan antarpemangku kepentingan dalam mengelola destinasi. Bichler (2021) menunjukkan bahwa desain tata kelola destinasi memiliki pengaruh penting terhadap partisipasi masyarakat lokal, sementara keterlibatan masyarakat dapat diperkuat melalui pertukaran pengetahuan, lokakarya, dan penyusunan strategi bersama. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya aktor dalam pembangunan destinasi. Pengelola, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan organisasi lainnya perlu ditempatkan sebagai bagian dari jejaring tata kelola.

Perspektif tersebut sejalan dengan konsep collaborative governance, yang menekankan keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan publik secara bersama-sama (Ansell & Gash, 2008). Dalam sektor pariwisata, pendekatan kolaboratif menjadi penting karena pengembangan destinasi melibatkan kepentingan ekonomi, lingkungan, sosial, kepemilikan sumber daya, serta kebutuhan wisatawan yang tidak selalu sama. Kajian Fathani et al. (2023) menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata berkelanjutan membutuhkan penguatan peran aktor kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Studi Wardana et al. (2023) juga memperlihatkan bahwa keberlanjutan destinasi memerlukan kerja sama multipihak dan keterlibatan masyarakat, terutama ketika pengembangan pariwisata beririsan dengan kebutuhan konservasi.

Keterlibatan masyarakat lokal menjadi semakin penting karena masyarakat merupakan kelompok yang berinteraksi langsung dengan destinasi dan menerima dampak pembangunan pariwisata. Masyarakat tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai aktor yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penerimaan manfaat ekonomi. Lee dan Jan (2019) menunjukkan bahwa community-based tourism memiliki hubungan erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas pariwisata dan memperoleh manfaat dari pengembangan destinasi. Partisipasi yang bermakna juga dapat memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap konservasi sumber daya.

Prinsip tersebut sangat relevan dalam pengembangan ekowisata mangrove. Ekosistem mangrove memiliki fungsi ekologis penting sekaligus dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan jasa lingkungan untuk kegiatan wisata dan pendidikan. Pengembangan ekowisata mangrove dapat menjadi instrumen untuk menghubungkan konservasi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara tepat. Nurhayati et al. (2023) menunjukkan bahwa penguatan masyarakat lokal dalam ekowisata mangrove perlu dilakukan melalui peningkatan kesadaran terhadap fungsi ekologis mangrove, edukasi masyarakat dan wisatawan, serta pemanfaatan nilai ekonomi kawasan tanpa mengabaikan konservasi. Dengan demikian, pengembangan wisata mangrove membutuhkan pendekatan yang berbeda dari wisata massal karena keberhasilan destinasi bergantung pada terpeliharanya ekosistem yang menjadi daya tarik utama.

Pengembangan pariwisata berbasis mangrove juga memerlukan dukungan kebijakan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan yang tidak disertai komunikasi, partisipasi, dan pembagian manfaat yang jelas berpotensi menimbulkan kesenjangan antara tujuan pembangunan dengan kepentingan masyarakat lokal. Sebaliknya, pemberdayaan dan partisipasi dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengambil peran dalam pengelolaan destinasi. Kajian Aqilah dan Islam (2024) pada ekowisata mangrove di Indonesia menunjukkan pentingnya keterkaitan antara kebijakan pemerintah, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Oleh sebab itu, tata kelola ekowisata mangrove perlu dibangun melalui mekanisme yang mampu mengintegrasikan pemerintah, pengelola, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Provinsi Bengkulu memiliki potensi wisata pesisir yang dapat dikembangkan melalui pendekatan tersebut. Salah satu kawasan yang memiliki potensi adalah Kampung Jenggalu Kito di Kota Bengkulu. Kawasan ini memiliki daya tarik berupa ekosistem mangrove, lanskap pesisir, serta peluang pengembangan wisata edukasi dan ekonomi kreatif masyarakat. Posisi kawasan yang relatif strategis juga memberikan peluang untuk dikembangkan sebagai alternatif destinasi wisata berbasis lingkungan di Kota Bengkulu. Apabila dikelola secara tepat, keberadaan mangrove tidak hanya dapat menjadi daya tarik wisata, tetapi juga dapat digunakan sebagai media pendidikan lingkungan, konservasi, pengembangan UMKM, kuliner, kerajinan, dan jasa pemanduan wisata.

Meskipun memiliki potensi tersebut, hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa pengelolaan Kampung Jenggalu Kito belum optimal. Sejumlah sarana dan prasarana belum berfungsi secara maksimal dan fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengunjung. Selain persoalan fasilitas, terdapat permasalahan tata kelola yang lebih mendasar, yaitu keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai perubahan status dan arah pemanfaatan kawasan, transparansi informasi yang belum optimal, partisipasi masyarakat yang masih terbatas, serta belum kuatnya sistem koordinasi dan pengawasan antarpemangku kepentingan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pengembangan destinasi sekaligus menimbulkan risiko apabila pembangunan wisata tidak mempertimbangkan fungsi ekologis mangrove.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Kampung Jenggalu Kito tidak cukup diselesaikan melalui penambahan fasilitas wisata. Pembangunan infrastruktur tanpa penguatan kelembagaan, transparansi, partisipasi, dan mekanisme pengawasan berpotensi menghasilkan pengembangan yang tidak berkelanjutan. Sharpley (2023) menekankan bahwa persoalan pariwisata berkelanjutan berkaitan erat dengan bagaimana tata kelola diterapkan pada tingkat destinasi. Demikian pula, Bichler (2021) menunjukkan bahwa tata kelola destinasi perlu memberi perhatian lebih besar kepada masyarakat lokal sebagai aktor penting dalam desain dan pengembangan destinasi. Dengan demikian, persoalan utama Kampung Jenggalu Kito perlu dilihat sebagai persoalan tata kelola destinasi, bukan semata-mata persoalan daya tarik dan fasilitas.

Kajian terdahulu telah banyak membahas pariwisata berkelanjutan, partisipasi masyarakat, community-based tourism, dan tata kelola destinasi (Bichler, 2021; Lee & Jan, 2019; Roxas et al., 2020). Penelitian tentang ekowisata mangrove juga menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat, konservasi, dan manfaat ekonomi lokal (Nurhayati et al., 2023; Aqilah & Islam, 2024). Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan perubahan status kawasan, transparansi kebijakan, partisipasi masyarakat, kondisi sarana-prasarana, pengawasan lingkungan, dan kolaborasi multipihak dalam tata kelola destinasi mangrove di Kampung Jenggalu Kito masih terbatas. Kesenjangan tersebut menjadi penting karena karakteristik kelembagaan, sosial, dan ekologis setiap destinasi memerlukan strategi pengelolaan yang kontekstual.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tata kelola Kampung Jenggalu Kito melalui integrasi aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan, fasilitas destinasi, serta keberlanjutan ekosistem mangrove sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi potensi wisata dan kendala pengembangan, tetapi juga mengarahkan analisis pada pembentukan tata kelola kolaboratif yang mampu menghubungkan kepentingan pemerintah, pengelola, masyarakat, wisatawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi tata kelola pariwisata di Kampung Jenggalu Kito, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi tata kelola pariwisata berkelanjutan berbasis kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap kajian tata kelola destinasi berbasis ekosistem mangrove serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, pengelola, dan masyarakat dalam mengembangkan Kampung Jenggalu Kito sebagai destinasi wisata edukasi dan konservasi yang berkelanjutan.

## 2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis tata kelola pariwisata berkelanjutan di Kampung Jenggalu Kito, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan setelah memperoleh izin penelitian pada 21 Oktober 2024. Fokus penelitian meliputi kondisi tata kelola pariwisata, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi optimalisasi pengelolaan destinasi berbasis keberlanjutan. Informan penelitian berjumlah sembilan orang yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan perannya dalam pengelolaan serta pengembangan Kampung Jenggalu Kito. Informan berasal dari unsur pengelola, pemerintah atau pemangku kebijakan, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui

dokumentasi dan dokumen pendukung yang relevan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai tata kelola, partisipasi masyarakat, koordinasi antarpemangku kepentingan, sarana dan prasarana, potensi ekosistem mangrove, serta permasalahan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan kondensasi/reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan ke dalam tema utama, yaitu tata kelola dan kelembagaan, partisipasi masyarakat, potensi wisata, sarana prasarana, serta faktor pendukung dan penghambat. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi antar-informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi optimalisasi tata kelola pariwisata berkelanjutan di Kampung Jenggalu Kito.

### 3 Hasil dan Pembahasan

#### Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian melibatkan sembilan informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan serta pengembangan Kampung Jenggalu Kito, Kota Bengkulu. Informan terdiri atas unsur pemerintah setempat, pengelola wisata, masyarakat, dan pengunjung. Keragaman informan digunakan untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai kondisi tata kelola, perubahan status kawasan, manfaat pengembangan pariwisata, serta permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

Keterlibatan beberapa kelompok informan memungkinkan penelitian membandingkan pandangan pihak yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan dengan pengalaman masyarakat serta pengunjung. Dalam penelitian pariwisata berkelanjutan, perspektif multipihak penting karena keberhasilan pengelolaan destinasi tidak hanya bergantung pada pemerintah atau pengelola, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dan aktor lainnya. Tata kelola pariwisata yang efektif membutuhkan kolaborasi, pembagian peran, serta koordinasi antarpemangku kepentingan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Bichler, 2021; Roxas et al., 2020).

#### Tata Kelola dan Perubahan Status Kawasan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perubahan status kawasan di Kampung Jenggalu Kito belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Sebagian informan belum mengetahui secara mendalam latar belakang, proses, maupun dasar perubahan status kawasan tersebut. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi antara proses kebijakan dan pemahaman masyarakat sebagai pihak yang secara langsung berkepentingan terhadap kawasan. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa perubahan status kawasan dipersepsikan memiliki beberapa tujuan, terutama meningkatkan perekonomian masyarakat, memberikan kepastian kepemilikan lahan, serta berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak.

Persoalan utama yang muncul adalah transparansi dan komunikasi kebijakan. Berdasarkan keterangan informan, proses perubahan status kawasan belum diketahui secara merata dan hanya pihak tertentu yang memahami proses tersebut secara lebih rinci. Kondisi ini penting diperhatikan karena tata kelola destinasi berkelanjutan memerlukan keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat. Bichler (2021) menekankan bahwa partisipasi pemangku kepentingan merupakan elemen penting dalam tata kelola destinasi karena keputusan pembangunan pariwisata akan memengaruhi kepentingan berbagai kelompok. Dengan demikian, komunikasi mengenai status kawasan, peruntukan lahan, hak masyarakat, serta arah pengembangan perlu dilakukan secara lebih terbuka.

Setelah perubahan status kawasan, beberapa bentuk pemanfaatan lahan yang teridentifikasi dari wawancara meliputi perluasan pemakaman, pengembangan pariwisata, dan peningkatan kepastian kepemilikan lahan. Dari perspektif sosial-ekonomi, perubahan tersebut dipandang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, perubahan pemanfaatan kawasan juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan apabila tidak disertai mekanisme pengendalian yang memadai. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan untuk kepentingan ekonomi dan pariwisata perlu ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan yang tetap mempertahankan fungsi ekologis mangrove.

Ekosistem mangrove memiliki posisi strategis karena tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi daya tarik ekowisata dan pendidikan lingkungan. Pengembangan wisata berbasis mangrove karenanya harus menghindari orientasi pembangunan yang hanya mengejar peningkatan jumlah pengunjung. Pengelolaan perlu mengintegrasikan konservasi, edukasi, manfaat ekonomi masyarakat, dan kualitas pengalaman wisata. Prinsip tersebut sejalan dengan paradigma pariwisata berkelanjutan yang menempatkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai fondasi pengembangan destinasi (Roxas et al., 2020).

### **Strategi Optimalisasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan**

Berdasarkan sintesis hasil wawancara, observasi, dan analisis terhadap kondisi pengelolaan, terdapat empat strategi prioritas untuk mengoptimalkan tata kelola Kampung Jenggalu Kito, yaitu peningkatan transparansi dan komunikasi kebijakan, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan sistem pengawasan dan pemantauan. Pertama, peningkatan transparansi dan komunikasi kebijakan menjadi strategi mendasar. Temuan menunjukkan bahwa informasi mengenai perubahan status dan arah pengembangan kawasan belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Pemerintah dan pengelola perlu menyediakan mekanisme komunikasi yang lebih terbuka melalui pertemuan masyarakat, forum konsultasi, papan informasi kawasan, dan media komunikasi lainnya. Transparansi diperlukan bukan hanya untuk menyampaikan keputusan yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan. Tata kelola kolaboratif menekankan pentingnya proses dialog dan keterlibatan antarpemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks (Ansell & Gash, 2008).

Kedua, pengembangan sarana dan prasarana wisata perlu diarahkan pada fasilitas yang mendukung karakter Kampung Jenggalu Kito sebagai destinasi berbasis mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi beberapa fasilitas belum memadai atau belum berfungsi secara optimal. Hal tersebut dapat memengaruhi kenyamanan, keamanan, dan pengalaman pengunjung. Pengembangan fasilitas sebaiknya tidak diarahkan pada pembangunan fisik secara berlebihan, tetapi pada fasilitas yang benar-benar dibutuhkan, seperti akses yang aman, fasilitas sanitasi, tempat istirahat, papan interpretasi mangrove, tempat sampah, informasi kawasan, dan sarana edukasi lingkungan. Pengembangan fasilitas yang memperhatikan daya dukung lingkungan menjadi penting agar peningkatan aktivitas wisata tidak justru menurunkan kualitas ekosistem yang menjadi daya tarik utama.

Ketiga, penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal perlu ditempatkan sebagai inti strategi pengembangan. Masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi penerima dampak pembangunan, tetapi perlu memperoleh ruang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata. Bentuk partisipasi dapat dikembangkan melalui keterlibatan masyarakat sebagai pemandu lokal, pengelola fasilitas, pelaku UMKM, penyedia kuliner, pengembangan kerajinan, serta penyedia produk berbasis budaya dan potensi lokal. Lee dan Jan (2019) menunjukkan bahwa keterlibatan dan persepsi masyarakat terhadap manfaat pariwisata memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan. Oleh sebab itu, distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal merupakan bagian penting dalam membangun dukungan jangka panjang terhadap destinasi. Keempat, diperlukan sistem pengawasan dan pemantauan yang jelas dan kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan belum kuatnya mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak.

Pemerintah dan pengelola perlu menyusun indikator pemantauan yang meliputi kondisi ekosistem mangrove, kebersihan kawasan, perubahan penggunaan lahan, kondisi fasilitas, aktivitas wisata, dan manfaat ekonomi masyarakat. Perguruan tinggi, komunitas lingkungan, serta organisasi masyarakat sipil dapat dilibatkan dalam pendampingan, penelitian, edukasi, dan pemantauan. Model tersebut dapat memperluas basis pengetahuan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kawasan.

Berdasarkan empat strategi tersebut, tata kelola Kampung Jenggalu Kito perlu diarahkan menuju *collaborative governance*, yaitu pengelolaan yang membangun hubungan kerja antara pemerintah, pengelola, masyarakat, akademisi, dan pihak eksternal lainnya. Kolaborasi menjadi penting karena masing-masing aktor memiliki sumber daya dan kapasitas yang berbeda. Pemerintah memiliki kewenangan regulasi, masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan langsung, pengelola memiliki pengalaman operasional, sedangkan akademisi dan organisasi eksternal dapat memberikan dukungan keilmuan, pendampingan, serta pengawasan.

Tabel 2. Strategi Prioritas Optimalisasi Tata Kelola Kampung Jenggalu Kito

| Permasalahan                          | Strategi Prioritas                                       | Arah Implementasi                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Transparansi kebijakan belum optimal  | Penguatan komunikasi dan keterbukaan informasi           | Sosialisasi, forum konsultasi, dan informasi publik                  |
| Sarana prasarana belum memadai        | Pengembangan fasilitas berbasis kebutuhan dan lingkungan | Fasilitas dasar, keamanan, sanitasi, dan sarana edukasi mangrove     |
| Partisipasi masyarakat masih terbatas | Pemberdayaan masyarakat lokal                            | UMKM, pemandu wisata, kuliner, kerajinan, dan pengelolaan destinasi  |
| Pengawasan terstruktur belum          | Sistem monitoring kolaboratif                            | Pemerintah, pengelola, masyarakat, akademisi, dan organisasi terkait |
| Koordinasi antarpihak perlu diperkuat | Penguatan kelembagaan kolaboratif                        | Pembagian peran, forum pengelolaan, dan evaluasi berkala             |

#### Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan

Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengembangan Kampung Jenggalu Kito. Faktor pendukung utama adalah lokasi yang strategis, potensi ekosistem mangrove, dukungan awal pemerintah daerah, dan peluang pengembangan ekonomi lokal. Lokasi kawasan yang berada di wilayah Kota Bengkulu memberikan keuntungan dari sisi aksesibilitas dan peluang pengembangan pasar wisata. Keberadaan mangrove juga memberikan karakteristik yang dapat menjadi pembeda dibandingkan destinasi wisata lainnya. Potensi mangrove dapat dikembangkan melalui konsep ekowisata yang menggabungkan rekreasi dengan pendidikan dan konservasi. Wisatawan tidak hanya diarahkan menikmati lanskap, tetapi juga memperoleh pengetahuan mengenai fungsi mangrove, biodiversitas, perlindungan pesisir, serta pentingnya konservasi lingkungan. Pengembangan konsep tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah destinasi sekaligus memperkuat identitas Kampung Jenggalu Kito sebagai kawasan wisata edukatif.

Di sisi lain, terdapat empat faktor penghambat utama, yaitu kurangnya transparansi kebijakan, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum adanya sistem pengawasan yang jelas. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan. Keterbatasan informasi dapat menurunkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, sementara rendahnya partisipasi dapat mengurangi rasa memiliki terhadap destinasi. Demikian pula, keterbatasan fasilitas berpotensi menurunkan kualitas pengalaman pengunjung dan daya saing destinasi.

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Tata Kelola Pariwisata

| Faktor Pendukung                                       | Faktor Penghambat                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lokasi strategis di wilayah Kota Bengkulu              | Transparansi kebijakan belum optimal                 |
| Potensi ekosistem mangrove yang khas                   | Sarana dan prasarana belum memadai                   |
| Dukungan awal pemerintah daerah                        | Partisipasi masyarakat masih terbatas                |
| Potensi pengembangan UMKM, kerajinan, dan budaya lokal | Sistem pengawasan belum terstruktur                  |
| Potensi wisata edukasi dan konservasi                  | Koordinasi antarpemangku kepentingan perlu diperkuat |

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Kampung Jenggalu Kito bukan terletak pada ketiadaan potensi, melainkan pada belum optimalnya tata kelola untuk mengubah potensi menjadi manfaat yang berkelanjutan. Keberadaan mangrove dan lokasi strategis merupakan modal awal, tetapi keduanya tidak otomatis menghasilkan destinasi yang berdaya saing apabila tidak didukung kelembagaan, fasilitas, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan yang memadai. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberlanjutan destinasi membutuhkan integrasi antara kapasitas kelembagaan, keterlibatan pemangku kepentingan, manfaat ekonomi lokal, dan perlindungan sumber daya alam (Bichler, 2021; Roxas et al., 2020).

#### Model Optimalisasi Tata Kelola Kampung Jenggalu Kito

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini mengusulkan model optimalisasi tata kelola yang bertumpu pada empat pilar: transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan keberlanjutan lingkungan. Transparansi menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat; partisipasi memastikan masyarakat memiliki posisi dan manfaat dalam pengembangan destinasi; kolaborasi mengintegrasikan kapasitas pemerintah, pengelola, masyarakat, akademisi, dan pihak eksternal; sedangkan keberlanjutan lingkungan memastikan bahwa pengembangan ekonomi tidak mengurangi fungsi ekologis mangrove.

Implikasi utama penelitian ini adalah bahwa optimalisasi Kampung Jenggalu Kito tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fasilitas fisik. Strategi perlu bergeser menuju penguatan *governance*, yaitu kejelasan kewenangan, transparansi informasi, partisipasi masyarakat, pembagian manfaat, koordinasi antarpihak, dan monitoring lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan wisata mangrove dapat berfungsi secara simultan sebagai instrumen konservasi, edukasi lingkungan, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan destinasi yang berkelanjutan. Namun, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sembilan informan, temuan merepresentasikan konteks Kampung Jenggalu Kito dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh destinasi mangrove.

#### 4 Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi tata kelola pariwisata berkelanjutan di Kampung Jenggalu Kito perlu difokuskan pada transparansi kebijakan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan kawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan informasi mengenai status kawasan, sarana dan prasarana yang belum memadai, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi dan pengawasan. Namun, lokasi strategis, potensi ekosistem mangrove, dukungan pemerintah, serta peluang pengembangan UMKM dan wisata edukasi menjadi modal penting bagi pengembangan destinasi. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pengelola, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kelestarian mangrove sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pemerintah dan pengelola disarankan meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat forum komunikasi antarpemangku kepentingan, serta mengembangkan fasilitas wisata yang sesuai dengan daya dukung ekosistem mangrove. Keterlibatan masyarakat perlu diperluas melalui UMKM, kuliner, kerajinan, jasa pemandu, dan kegiatan ekonomi kreatif. Selain itu, diperlukan sistem monitoring kolaboratif untuk mengevaluasi kondisi lingkungan, fasilitas, aktivitas wisata, dan manfaat ekonomi secara berkala. Penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menguji efektivitas tata kelola pariwisata berkelanjutan secara lebih komprehensif.

## 5 Daftar Pustaka

- Angkasa, Z., Alessander, A., Harmiati, H., Purnawan, H., & Parwito, P. (2022). Analysis of community participation in maritime tourism productivity development based on social capital (Study in Padang Betuah Village, Pondok Kelapa District, Central Bengkulu Regency). *Journal of Social Science and Humanities*, 1(1), 7–12.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aqilah, H. N., & Islam, D. (2024). Government policy, empowerment and community participation in sustainable tourism development in ecotourism Mangrove Lembung Pamekasan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2581–2592. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2987>
- Bichler, B. F. (2021). Designing tourism governance: The role of local residents. *Journal of Destination Marketing & Management*, 19, 100389. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100389>
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2). <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Fajriah, S. D., & Mussadun, M. (2014). Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pariwisata pantai yang berkelanjutan (Studi kasus: Kawasan pesisir Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 10(2), 218–233. <https://doi.org/10.14710/pwk.v10i2.7653>
- Fathani, A. T., Azmi, N. A., Purnomo, E. P., Tham, S. A., & Ahmad, R. (2023). A systematic review of tourism governance: Sustainable tourism governance model post COVID-19. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(1), 35–50. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i1.1125>
- Gusmao, A., Pramono, S. H., & Sunaryo, S. (2013). Sistem Informasi Geografis Pariwisata Berbasis Web.EECCIS, 7(2).
- Lee, T. H., & Jan, F.-H. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents' perceptions of the sustainability. *Tourism Management*, 70, 368–380. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.003>
- Nurhayati, A., Akbarsyah, N., Pamungkas, W., Herawati, T., & Yustiati, A. (2023). Strengthening local community in mangrove ecotourism at Pangandaran, West Java Province, Indonesia. *Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research*, 21(3), 44–52. <https://doi.org/10.9734/ajfar/2023/v21i3543>
- Pajriah, S. (2018). Peran sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.25157/ja.v5i1.1913>
- Prihanta, W., Syarifuddin, A., & Zainuri, A. M. (2017). Pembentukan kawasan ekonomi melalui pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. *Jurnal Dedikasi*, 14, 73–84.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Framework for creating sustainable tourism using systems thinking. *Current Issues in Tourism*, 23(3), 280–296. <https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1534805>
- Sharpley, R. (2023). Sustainable tourism governance: Local or global? *Tourism Recreation Research*, 48(5), 809–812. <https://doi.org/10.1080/02508281.2022.2040295>

Wardana, S., Handayani, D., & Ilmika, A. (2023). Community participation-based tourism governance in post COVID-19: Case study on conservation in Borobudur Temple. *International Journal of Conservation Science*, 14(4), 1591–1608. <https://doi.org/10.36868/IJCS.2023.04.22>